Peroleh Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Dari Menkumham, Pj. Bupati Andriyanto Berharap Jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pasuruan Kian Bertambah

Selasa, 30 Juli 2024

Penjabat Bupati Pasuruan, Andriyanto, menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly. Penghargaan ini diberikan atas upaya pembinaan dan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Piagam penghargaan juga diberikan kepada Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul Huda, dan Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, atas peran aktif mereka dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Kemenkumham RI meresmikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Hotel Singhasari Resort Batu. Tiga desa di Kabupaten Pasuruan, yaitu Kelurahan Purwosari, Desa Benerwojo, dan Desa Jatisari, diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Ketiganya sebelumnya telah dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Pasuruan tahun 2023. Total ada 223 Desa/Kelurahan di Jawa Timur yang mendapatkan predikat Anubhawa Sasana Desa atau Sadar Hukum.

Pj. Bupati Andriyanto berharap jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pasuruan terus bertambah. Ia percaya bahwa Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, seperti peningkatan kesadaran hukum, akses informasi yang lebih mudah, dan penyelesaian masalah hukum secara musyawarah. Andriyanto meyakini bahwa Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan mendorong terciptanya budaya hukum yang kuat di Kabupaten Pasuruan.

Saat ini, setidaknya terdapat 497 desa/kelurahan di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan binaan sadar hukum. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, jumlah ini masih kecil dan perlu ditingkatkan agar semua Desa/Kelurahan di Jawa Timur menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Heni percaya bahwa dengan meningkatkan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Indonesia akan semakin kuat sebagai negara hukum.

Pj. Gubernur Jatim, yang diwakili oleh Kabiro Hukum Setda Pemprov Jawa Timur, Lilik Pujiastuti, menekankan pentingnya peningkatan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Lilik percaya bahwa dengan memperbanyak Desa/Kelurahan Sadar Hukum, penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan dengan musyawarah dan kekeluargaan, sehingga mengurangi beban peradilan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya